



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**2025
EDITION**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LKjIP ini merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandate untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Paser termasuk peran Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, 27 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Laporan
 - a.1. Maksud Laporan
 - a.2. Tujuan Laporan
- B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Indikator Kinerja Utama
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - a.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023
 - a.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya
- B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisa Efisiensi
- E. Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran - saran

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Kabupaten Paser.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 – 2026.

Analisa terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan nilai rata – rata **96,36 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Paser yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi

pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Paser. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Paser. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah:

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser terdiri dari:

- a. *Sekretaris Daerah;*
- b. *Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :*
 1. *Bagian Tata Pemerintahan*
 2. *Bagian Kesejahteraan Rakyat*
 3. *Bagian Hukum*
 4. *Bagian Kerja Sama*
- c. *Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :*
 1. *Bagian Perekonomian*
 2. *Bagian Administrasi Pembangunan*
 3. *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
 4. *Bagian Sumber Daya Alam*
- d. *Asisten Administrasi Umum yang membawahi :*
 1. *Bagian Umum*
 2. *Bagian Organisasi*
 3. *Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
 4. *Bagian Perencanaan dan Keuangan*

LKjIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASERP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASERP


 ANDI AZIS
 NIP 19680816 199603 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAMI FADLI

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan *perumusan perencanaan yang berkualitas*. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam *Penunjang Urusan Pemerintahan*.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, dan akar masalah, serta hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel I

Tabel Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Ketidak jelasan kewenangan dalam Pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih Antara Dinas, Badan, Bagian dan Ketersediaan sumber daya aparatur. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan Kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.</i>
2	Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional.	<i>Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan atau ketersediaan sumber daya aparatur serta Pelayanan Yang belum memahami SOP akan menghasilkan kerja yang kurang baik secara vertikal maupun horizontal, dan Kekurang mampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas Tersebut kepada pejabat lain yang</i>

		dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya.
--	--	--

Sumber : RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022-2026

D. ISU STRATEGIS

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai PD yang mempunyai tugas pokok *melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*UNRESOLVED MATTERS*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD (Focus Grup Discussion) atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah ***Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan Profesional.***

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala

yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Menjelaskan Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Berdasarkan Urusan dan Program yang diampu,

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian misi Kabupaten Paser yang tercantum pada RPJMD yaitu Misi kedua ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.*** Tujuan dari misi kedua tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik*** diantaranya adalah:

1. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
5. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebanyak 5 (lima) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Setda Kabupaten Paser

No.	Indikator		Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	2022		2023		2024		2025		2026			
			Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP	Rata-rata Nilai (Predikat) AKIP Perangkat Daerah	0	B (70)	0	B (70)			BB (71)		BB (71)		A (81)	A
		Indeks kepuasan layanan administrasi umum							85		90		95	95
2	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	85		85				90		90		95	95
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan							90		90		95	95

*LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025*

No.	Indikator		Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	2022		2023		2024		2025		2026		
			Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	80		80			85		90		95	95

*LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025*

Tabel 2.2

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Defenisi Operasional	Formulasi/Penjelasan	Sumber Data
3	5			
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	"Ukuran tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi internal atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tertentu."	$\text{Rata-rata Nilai AKIP} = \frac{\sum \text{Nilai AKIP Seluruh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Dievaluasi}}$	LHE Inspektorat
	Indeks kepuasan layanan administrasi umum	"Nilai persepsi atau tingkat kepuasan pengguna layanan (baik internal pegawai maupun stakeholder eksternal) terhadap kualitas penyelenggaraan urusan administrasi umum, yang meliputi ketepatan waktu persuratan, kemudahan akses informasi kepegawaian, kejelasan prosedur keuangan, serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor."	Survei mandiri	Renja Sekretariat Daerah 2025
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Ukuran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan (menindaklanjuti) rekomendasi atau kesepakatan hasil rapat koordinasi bidang pemerintahan umum menjadi tindakan nyata atau dokumen kebijakan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Jumlah Hasil Koordinasi yang Dihasilkan}} \times 100\%$	Renja Sekretariat Daerah 2025
	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Tingkat kesesuaian antara tindakan (pelaksanaan program/kebijakan) dengan hasil kesepakatan koordinasi di bidang Kesejahteraan Rakyat (seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan) yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi Kesra yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Target/Rekomendasi Koordinasi Kesra yang Ditetapkan}} \times 100$	Renja Sekretariat Daerah 2025

*LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Defenisi Operasional	Formulasi/Penjelasan	Sumber Data
3	5			
Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Tingkat keberhasilan instansi dalam menjalankan rekomendasi atau keputusan hasil koordinasi kebijakan terkait perekonomian (seperti inflasi, UMKM, pasar) dan pembangunan (infrastruktur, tata ruang) agar selaras dengan regulasi yang berlaku.	$P = \left(\frac{RKP_t}{RKP_{tota}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>P</i>: Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti. • <i>RKP_t</i>: Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang selesai ditindaklanjuti. • <i>RKP_{tota}</i>: Total jumlah Rekomendasi/Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dihasilkan. 	Renja Sekretariat Daerah 2025

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026 yang telah direvisi, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah menetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran beserta targetnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	80 (BB)
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	90
2	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan	90
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang Kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	90
3	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	85

Tabel 2.4

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		48.335.617.244
		Administrasi Tata Pemerintahan	4.087.549.096
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.271.372.590
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.216.127.323
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	760.568.235
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan		6.418.242.622
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.030.975.560
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.002.057.691
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	993.461.644
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.391.747.727	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		138.520.273.902
		Penataan Organisasi	1.555.961.240
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	995.240.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.613.116.514
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.066.468.395	

LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.699.150.600
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.745.677.960
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.484.011.895
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	809.265.822
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.012.239.788
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.539.141.688
TOTAL			193.274.133.768

Tabel 2.5

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persen	90	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	Persen	100	48.335.617.244			
						2. Nilai LPPD		3,33				
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persen	90	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	100			4.087.549.096	
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	100			3.271.372.590	
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	100			40.216.127.323	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100	100	760.568.235								
2	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persen	90	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	6.418.242.622			
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ		100			100	3.030.975.560
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi		100			100	1.002.057.691
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan		100			100	993.461.644

*LKjIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025*

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	100	1.391.747.727	
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80 (BB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat		80	138.520.273.902	
		Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai	90	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	100	1.555.961.240	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	995.240.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	30.613.116.514	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	100	31.066.468.395	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	15.699.150.600	
					Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	100	5.745.677.960	
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	100	5.484.011.895	

*LKjIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025*

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	100	809.265.822	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	44.012.239.788	
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	100	2.539.141.688	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

Hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar 77,92 dengan kategori BB, >70-80, Sangat Baik, dengan interpretasi “Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.”.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP 2024 memperoleh nilai total sebesar 77,92 katagori BB. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi dan perbandingan dengan hasil sebelumnya sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	26,22	27,92
Pengukuran Kinerja	30	22,93	23,06
Pelaporan Kinerja	15	10,52	13,02
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,17	77,92
Kategori		BB	BB

Terdapat 1 (satu) komponen Pelaporan Kinerja yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan masih perlu upaya perbaikan dari aspek Kualitas dan Pemanfaatan. Sedangkan pada komponen Perencanaan Kinerja,”dan Pengukuran Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah baik dan perlu dipertahankan pada tahun berikutnya.

Tindak Lanjut LHE TahunSebelumnya

Terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 dimana terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang disampaikan APIP telah ditindak lanjuti antara lain:berikut ;

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Bukti (evidence)
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja (Renja Tahun 2024) di website resmi OPD tepat waktu	Mempublikasikan semua dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun dan disahkan pada website resmi OPD dan website esr.menpan.go.id tepat waktu	Sep-25	Bukti hasil publikasi/unggahan dokumen perencanaan kinerja di website resmi OPD dan website esr.menpan.go.id tepat waktu
2	Melaksanakan dan mendokumentasikan rapat perencanaan kinerja pada level bidang dan sekretariat	Mendokumentasikan rapat perencanaan kinerja di level bidang dan sekretariat (undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan)	Januari 2025 s.d Januari 2026	Dokumentasi rapat perencanaan di level bidang dan sekretariat (undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan)
3	Melengkapi Rencana Aksi dengan mencantumkan anggaran sesuai PK dan penanggungjawab masing-masing kegiatan/sub kegiatan	Menyusun Rencana Aksi yang mencantumkan target dan juga anggaran sesuai PK dan penanggungjawab per kegiatan/sub kegiatan	Januari s.d Februari 2026	Dokumen Renaksi yang memuat target dan anggaran sesuai PK
4	Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sumber data yang sesuai dengan penjelasan definisi operasional dan melibatkan penanggungjawab bagian Tata Pemerintahan	Menyusun Indikator Kinerja Utama sesuai dengan sumber data, definisi operasional dan melibatkan penanggungjawab pada semua bagian di lingkungan sekretariat daerah.	Januari s.d Februari 2026	IKU yang memuat sumber data sesuai definisi operasional dan penanggungjawab melibatkan semua bagian di lingkungan sekretariat daerah
5	Membuat data kinerja yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Bagian yang merupakan hasil pengukuran dan pemantauan unit di bawahnya secara berjenjang, sesuai dengan definisi	Menyusun data kinerja dari setiap bidang dari hasil pengukuran kinerja dan pemantauan secara berjenjang sesuai dengan definisi	Januari 2025 s.d Januari 2026	Dokumen hasil pengukuran kinerja dan pemantauan secara berjenjang dari setiap bidang yang sesuai dengan IKU dan PK dan telah ditandatangani oleh

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Bukti (evidence)
	operasional pada Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja masing-masing Kepala Bagian yang ditandatangani oleh setiap Kepala Bagian serta diketahui Asisten	operasional pada IKU dan PK serta ditandatangani oleh setiap bagian dan diketahui Asisten		bagian penanggungjawab serta diketahui oleh Asisten
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada level bidang dan sekretariat secara berkala setiap triwulan, menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang disertai evidence/bukti dukung terhadap hasil kinerja, serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disertai dengan bukti dukung terhadap hasil kinerja (RATL)	Januari 2025 s.d Januari 2026	Dokumen rencana aksi tindak lanjut (RATL) dari hasil monitoring dan evaluasi beserta bukti dukungnya
7	Menyusun LKJIP Tahun 2025 dengan melengkapi informasi:	Membuat laporan kinerja tahun 2025 dengan dilengkapi informasi		LKJIP Tahun 2025 yang telah memuat informasi
	a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun pelaporan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya (2024, 2023 dan 2022) serta analisis perbandingannya	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun pelaporan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta analisis perbandingannya	Januari s.d Februari 2026	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun pelaporan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta analisis perbandingannya
	b. Analisis realisasi capaian kinerja secara kumulatif hingga tahun dilakukan evaluasi dengan target akhir/total Renstra	Analisis realisasi capaian kinerja secara kumulatif hingga tahun dilakukan evaluasi dengan target akhir/total Renstra	Januari s.d Februari 2026	Analisis realisasi capaian kinerja secara kumulatif hingga tahun dilakukan evaluasi dengan target akhir/total Renstra
	c. Penyebab keberhasilan/kegagalan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta	Penyebab keberhasilan/kegagalan pada Indikator Kinerja	Januari s.d Februari 2026	Penyebab keberhasilan/kegagalan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta alternatif solusi yang telah

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Bukti (evidence)
	alternatif solusi yang telah dilakukan	Utama (IKU) serta alternatif solusi yang telah dilakukan		dilakukan
	d. Upaya-upaya dalam efisiensi anggaran, analisis efektivitas atas penggunaan sumber daya non keuangan dan upaya untuk melakukan efisiensi atas penggunaan sumber daya non keuangan	Upaya-upaya dalam efisiensi anggaran, analisis efektivitas atas penggunaan sumber daya non keuangan dan upaya untuk melakukan efisiensi atas penggunaan sumber daya non keuangan	Januari s.d Februari 2026	Upaya-upaya dalam efisiensi anggaran, analisis efektivitas atas penggunaan sumber daya non keuangan dan upaya untuk melakukan efisiensi atas penggunaan sumber daya non keuangan
8	Mengimplementasikan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TLHE) serta melakukan inovasi, pemanfaatannya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja	Membuat implementasi atas hasil tindak lanjut evaluasi tahun 2024 disertai hasil pemanfaatannya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja	Januari s.d Februari 2026	Dokumen hasil implementasi tindak lanjut evaluasi tahun 2024 serta bukti hasil pemanfaatan yang telah dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2025

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Sangat Berhasil	Hijau
2	90 % – 99,9 %	Berhasil	orange
3	70% < 89,9%	Cukup Berhasil	Biru
4	50% < 69,9%	Kurang Berhasil	Kuning
5	<50%	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh *Sekretariat Daerah Kabupaten Paser* dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum	%	90	90	100,00	
	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum	%	90	88,33	98,14	
Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum	%	90	86,32	95,91	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	LHE SAKIP dari inspektorat	Nilai	80 (BB)	71,37(BB)	89,21 (A)	
	Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Survei mandiri	Nilai	90	88,69	98,54	
RATA-RATA PENCAPAIAN IKU						96,36	Berhasil

Untuk Tahun 2004 hasil Reviu dokumen perencanaan oleh inspektorat disarankan untuk merevisi Dokumen Perencanaan, untuk indikator **Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah** diukur dengan rata rata nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah tahun 2023 oleh inspektorat, dan indikator **Indeks kepuasan**

layanan administrasi umum di lakukan pengukuran dengan hasil survey kepuasan atas layanan Bagian Umum, Bagian Protokol Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan Capaian Kinerja ini dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, sedangkan **Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan** dilakukan pengukuran dengan persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah yang di buat tahun 2024 **Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan** dilakukan pengukuran dengan persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah yang dibuat pada tahun 2024 Capaian Kinerja ini Dilaksanakan pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, **Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan** dilakukan pengukuran dengan persentase hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah TA. 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 sebanyak 5 indikator mendapatkan kriteria “Berhasil” (capaian diatas 85% - 100%).Realisasi indikator kinerja utama 96,36%.

Tabel 3.3
Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Capaian Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			
		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Dinas Lingkungan Hidup	68,94	B	82,16	A
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan	71,91	BB	80,58	A
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	79,49	BB	79,14	BB
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	77,17	BB	77,92	BB
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	75,75	BB	76,86	BB
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	72,89	BB	76,36	BB
7	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	77,65	BB	76,45	BB
8	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Dan Persandian	72,73	BB	76,28	BB
9	Badan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	72,58	BB	76,6	BB
10	Dinas Perhubungan	74,67	BB	75,66	BB
11	Inspektorat	67,89	B	75,06	BB
12	Sekretariat DPRD	69,88	B	75,96	BB
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	74,4	BB	75,32	BB
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	72,69	BB	73,48	BB
15	Badan Pendapatan Daerah	71,91	BB	72,3	BB
16	Dinas Ketahanan Pangan	70,36	BB	71,94	BB
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	71,51	BB	71,52	BB
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71,2	BB	71,26	BB
19	Kecamatan Kuaro	62,63	B	71,66	BB
20	Kecamatan Muara Samu	69,87	B	71,4	BB
21	Kecamatan Long Kali	69,96	B	70,58	BB
22	Dinas Perikanan	69,65	B	70,34	BB
23	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69,93	B	70,12	BB
24	Dinas Sosial	69,76	B	70,08	BB
25	Kecamatan Long Ikis	69,24	B	70,86	BB
26	Dinas Kesehatan	69,11	B	70,66	BB
27	Satuan Polisi Pamong Praja	67,74	B	69,24	BB
28	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	74,44	BB	68,42	B
29	Dinas Pemadam Kebakaran	61,84	B	68,62	B
30	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	62,65	B	67,50	B
31	Kecamatan Tanah Grogot	65,78	B	66,16	B
32	Kecamatan Tanjung Harapan	65,53	B	65,52	B

No.	Perangkat Daerah	Capaian Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			
		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
33	Kecamatan Batu Sopang	64,91	B	65,86	B
34	Kecamatan Paser Belengkong	64,76	B	65,72	B
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64,4	B	65,20	B
36	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	60,31	B	64,52	B
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	63,42	B	62,6	B
38	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	61,18	B	61,68	B
39	Kecamatan Muara Komam	60,38	B	61,04	B
40	Kecamatan Batu Engau	60,29	B	62,30	B
41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60,61	B	60,1	B
	NILAI RATA - RATA	68,83	B	71,37	BB

Tabel 3.4

- Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan**
- Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Hasil Koordinasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	90	90	100,00%
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	90	88,33	98,14%
Rata Rata Capaian Kinerja				99,07%

Tabel 3.5

1. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	90	86,32	95,91%
Rata Rata Capaian Kinerja				95,91%

Tabel 3.6

1. Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah

2. Indeks kepuasan layanan administrasi umum 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80 (BB)	71,37 (BB)	89,21%
Indeks kepuasan layanan administrasi umum		90	88,69	98,54%
Rata Rata Capaian Kinerja				93,88%

B.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan **peningkatan kualitas** pada aspek-aspek strategis. Meskipun secara persentase "Capaian" terlihat menurun (dari 177,85 ke 154,85), hal ini bukan menunjukkan penurunan kinerja, melainkan akibat dari **penetapan target yang lebih tinggi dan realistis** pada tahun 2025.

Poin positif yang menonjol adalah kenaikan **Rata-rata Nilai AKIP** (dari 68,95 ke 71,37) yang menunjukkan akuntabilitas organisasi semakin sehat, serta **Indeks Kepuasan Layanan** yang meningkat ke angka 90, mencerminkan pelayanan administrasi yang semakin baik dirasakan oleh pengguna layanan.

Faktor Pendorong (Success Factors)

- **Komitmen Pimpinan:** Adanya asistensi yang intensif dari pimpinan dalam mengawal implementasi SAKIP sehingga nilai AKIP meningkat ke predikat yang lebih baik.
- **Koordinasi yang Solid:** Keberhasilan Bidang Perekonomian mencapai realisasi 100% menunjukkan sinergi antar unit kerja dalam menindaklanjuti kebijakan daerah sudah berjalan sangat efektif.
- **Digitalisasi Administrasi:** Penggunaan sistem informasi dalam layanan

administrasi umum mendorong peningkatan indeks kepuasan karena proses menjadi lebih cepat dan transparan.

Faktor Penghambat (Constraints)

- **Perubahan Aturan:** Sering adanya perubahan regulasi dari pusat yang membuat tim di daerah harus mendesain ulang rencana kerja.
- **Waktu yang Terbatas:** Banyaknya agenda kegiatan yang bersamaan sehingga beberapa tindak lanjut kebijakan sedikit terlambat.
- **Sarana Pendukung:** Masih perlunya perbaikan pada sistem data digital agar pengolahan informasi bisa lebih cepat lagi.

Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya tidak dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya:

LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2024		2025		Keterangan
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	117,32	130,36	90	100,00	
2	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	91,31	101,46	90	88,33	
3	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	87,22	102,61	100	98,33	
4	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,95	97,11	71,37	89,21	
5	Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai	86,72	102,02	90	88,69	
				177,85		154,85	

Sumber : Sasaran pada Dokumen Perjanjian Kinerja 2025.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Capaian Kinerja Organisasi / Instansi Sejenis

Berikut tersaji perbandingan capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama / IKU yang selaras pada Organisasi / Instansi sejenis seperti Bappenas, Bappeda dan Bappeda Propinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut

No	Organisasi/Instansi	Indikator Kinerja Sasaran/IKU	Realisasi Kinerja (%)
1	Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim	Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	82,15
2	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77,05
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,92

Sumber : LkjiP Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2024, LkjiP Kota Balikpapan Tahun 2024

Dari perbandingan indikator kinerja utama di atas, keselarasan dan sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan baik. Di Tingkat Propinsi keselarasan perencanaan pembangunan lebih menekankan pada tingkat keberhasilan dan pencapaian target prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sendiri menggunakan pendekatan keduanya, yaitu dengan menetapkan indikator Tujuan Renstra yaitu Indeks Kualitas Perencanaan yang di dalamnya sudah secara komprehensif menggabungkan aspek keselarasan, konsistensi, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

B.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Realisasi kinerja tahun 2025 memberikan keyakinan bahwa dengan sumber daya yang ada dan strategi yang tepat, seluruh target kinerja sasaran pada akhir periode Renstra akan dapat **tercapai secara maksimal**. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra 2026	Capaian Periode Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum dikalikan 100%	%	98,89	95	95
	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat dikalikan 100%	%	83,33	95	95
Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	86,32	95	100
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,37 (BB)	80 (A)	A
	Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai	88,69	80	77
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	88,32	100	1. 100
	Nilai LPPD	Nilai LPPD dari KEMENDAGRI	Nilai	2,78	2. 3,33	2. 3,33
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang	Capaian Kinerja yang dilaksanakan pada Program Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	86,32	100	100

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra 2026	Capaian Periode Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5	6	7
	ditindaklanjuti					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Survei	Angka	88,69	80	80

Sumber : 1. Renstra 2022-2026, 2. Evaluasi Renja Tahun 2025

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum kinerja sasaran berada pada kategori Sangat Baik.

1. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Secara akumulatif, rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 mencapai 154,85%. Meskipun secara angka persentase terjadi penurunan dibanding tahun 2024 (177,85%), secara kualitas terjadi peningkatan substansial pada indikator-indikator kunci sebagai berikut:

- Peningkatan Akuntabilitas (Nilai AKIP): Realisasi Nilai AKIP meningkat dari 68,95 menjadi 71,37. Kenaikan ini sangat signifikan karena berhasil mengubah predikat organisasi dari B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang semakin selaras dengan hasil kinerja (outcome).
- Kualitas Layanan Administrasi: Indeks Kepuasan Layanan mencapai angka 90. Hal ini mencerminkan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan administrasi umum telah berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh para pengguna layanan.
- Koordinasi Kebijakan: Bidang Perekonomian dan Pembangunan menunjukkan performa sempurna dengan realisasi 100%. Sementara itu, Bidang Pemerintahan Umum konsisten di angka 90% (Capaian 100% dari target), menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Pendorong Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran pada tahun ini didorong oleh beberapa faktor utama:

- Komitmen Pimpinan: Pendampingan intensif dalam perbaikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- Sinergi Antar Unit Kerja: Tingginya kolaborasi lintas bidang dalam menindaklanjuti rekomendasi kebijakan daerah.
- Optimalisasi Teknologi: Pemanfaatan sistem digital dalam administrasi yang mempercepat alur kerja dan pengarsipan.

3. Identifikasi Masalah dan Kendala

Terdapat satu indikator, yaitu Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), yang mengalami penurunan capaian menjadi 88,33%. Hal ini diidentifikasi disebabkan oleh:

- Kompleksitas Regulasi: Perubahan kebijakan jaminan sosial dan bantuan kemasyarakatan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian regulasi di tingkat daerah.
- Keterbatasan SDM: Beban kerja koordinasi yang tinggi di akhir tahun anggaran yang sedikit menghambat durasi tindak lanjut administrasi.

Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8.1.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	90	117,32	130,36	90	90	100,00
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	90	91,31	101,46	90	88,33	98,14
Rata Rata Capaian Kinerja				115,91			99,07

Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator utama yang fokus pada koordinasi kebijakan bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 mencapai **99,07%**, yang menunjukkan performa yang **Sangat Baik** dan hampir memenuhi target total yang ditetapkan.

Analisis Indikator

- **Bidang Pemerintahan Umum:** Berhasil mencapai target secara sempurna (**100%**) dengan realisasi sebesar 90% dari target 90%. Meskipun secara angka realisasi lebih rendah dibanding tahun 2024 (117,32%), capaian tahun 2025 menunjukkan akurasi perencanaan yang lebih presisi sesuai dengan ketentuan perundangan.
- **Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra):** Realisasi mencapai **88,33%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **98,14%**. Terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, namun capaian di atas 98% menandakan bahwa sebagian besar koordinasi kebijakan bidang kesra telah ditindaklanjuti dengan baik.

Faktor Pendorong dan Penghambat

- **Pendorong:** Adanya sinergi yang kuat dalam proses fasilitasi kebijakan dan kepatuhan unit kerja terhadap norma serta standar prosedur operasional di bidang pemerintahan umum.
- **Penghambat:** Adanya dinamika regulasi pada bidang Kesejahteraan Rakyat yang memerlukan penyesuaian administratif tambahan, sehingga proses tindak lanjut memerlukan waktu lebih lama untuk memastikan kesesuaian dengan aturan terbaru.

**Analisis Pencapaian Sasaran Program
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	100	98,33	98,33
Nilai LPPD	Nilai	3,2	-	-
Rata rata Capaian Kinerja				98,33

Secara umum, rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Program ini pada tahun 2025 adalah sebesar **98,33%**. Angka ini menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik**, di mana hampir seluruh target perumusan kebijakan telah berhasil ditindaklanjuti secara efektif.

Analisis Indikator

- **Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra:** Indikator ini mencapai realisasi **98,33%** dari target 100%. Hal ini mencerminkan tingginya komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan daerah, meski terdapat hambatan kecil dalam penyelesaian administrasi secara menyeluruh.
- **Nilai LPPD:** Tercatat realisasi sebesar **0**. Hal ini dikarenakan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) biasanya bersifat *lagging indicator*, di mana nilai resmi untuk tahun 2025 baru akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri) pada tahun berikutnya setelah melalui proses audit dan validasi nasional.

Faktor Pendorong dan Penghambat

- **Faktor Pendorong:** Adanya koordinasi yang intensif antar unit kerja dalam menyusun draf kebijakan sehingga substansi rumusan menjadi lebih berkualitas dan aplikatif.
- **Faktor Penghambat:** Keterlambatan rilis nilai resmi LPPD dari pusat menyebabkan data realisasi belum dapat diinput secara final dalam periode laporan ini. Selain itu, dinamika regulasi di bidang Kesra memerlukan waktu tambahan untuk harmonisasi aturan.

Tabel 3.8.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	%	85	87,22	102,61	90	86,32	95,91
Rata Rata Capaian Kinerja				102,61			95,91

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan. Pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja sasaran ini tercatat sebesar 95,91%. Meskipun secara persentase sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 (102,61%), kinerja ini tetap dikategorikan Sangat Baik karena berada di atas ambang batas 90%.

Analisis Indikator

Realisasi Kinerja: Pada tahun 2025, realisasi fisik mencapai 86,32%. Angka ini menunjukkan konsistensi yang terjaga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (87,22%). **Capaian Target:** Dengan target yang dinaikkan menjadi 90 pada tahun 2025 (dari sebelumnya 85 pada tahun 2024), organisasi tetap mampu menunjukkan performa yang stabil. Capaian sebesar 95,91% membuktikan bahwa hampir seluruh koordinasi kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan telah berhasil ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Pendorong: Adanya sinergi yang efektif antara unit kerja bidang perekonomian dalam menyusun langkah-langkah strategis pembangunan daerah, serta kepatuhan yang tinggi terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Penghambat: Kenaikan target kinerja menuntut akselerasi tindak lanjut yang lebih cepat. Terhambatnya beberapa dokumen administrasi akibat penyesuaian regulasi baru di sektor ekonomi menjadi kendala dalam mencapai target 100% secara utuh.

Analisis Pencapaian Sasaran Program Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	96,32	96,32
Rata rata Capaian Kinerja		100,00	96,32	96,32

Capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2025 berada pada kategori Sangat Tinggi dengan nilai rata-rata capaian sebesar 96,32%. Angka ini menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara efektif dan mendekati target maksimal yang telah ditetapkan.

Analisis Indikator

- **Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti:** Dari target ambisius sebesar 100%, organisasi berhasil merealisasikan 96,32%. Hal ini mencerminkan bahwa hampir seluruh rumusan kebijakan di sektor perekonomian dan pembangunan telah berhasil diimplementasikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- **Kualitas Pelaksanaan:** Selisih sebesar 3,68% dari target sempurna menunjukkan adanya beberapa poin kebijakan yang masih dalam proses penyelesaian administratif di akhir tahun anggaran, namun tidak mengganggu performa program secara keseluruhan.

Faktor Pendorong dan Penghambat

- **Faktor Pendorong:** Kuatnya koordinasi lintas sektor dalam mengawal kebijakan ekonomi daerah serta respons yang cepat dari unit kerja terkait dalam menjalankan instruksi pembangunan.
- **Faktor Penghambat:** Beberapa kebijakan di sektor pembangunan memerlukan verifikasi teknis yang mendalam dan memakan waktu, sehingga proses tindak lanjutnya sedikit melampaui jadwal yang direncanakan.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (80)	B (68,95)	86,19	BB (80)	BB (71,37)	89,21
Indeks kepuasan layanan administrasi umum	Nilai	72	73,47	102,04	90	88,69	98,54
Rata Rata Capaian Kinerja				94,11			93,88

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi umum pada tahun 2025 tercapai dengan predikat Sangat Baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93,88%. Hasil ini menunjukkan konsistensi performa organisasi dalam mempertahankan standar pelayanan dan akuntabilitas meskipun target yang ditetapkan semakin meningkat.

Analisis Indikator

- Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah: Terjadi peningkatan kualitas yang sangat signifikan secara substansial. Realisasi nilai naik dari 68,95 (B) pada tahun 2024 menjadi 71,37 (BB) pada tahun 2025. Meskipun capaian persentase tercatat 89,21% karena target yang dinaikkan, keberhasilan menembus predikat BB menunjukkan sistem manajemen kinerja telah berjalan sangat baik dan lebih efisien.
- Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum: Realisasi indeks kepuasan mencapai angka 88,69 dengan capaian target sebesar 98,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (73,47), terdapat lonjakan kualitas layanan yang sangat tajam, yang membuktikan bahwa inovasi pelayanan administrasi dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pengguna layanan.

Faktor Pendorong dan Penghambat

- **Pendorong:** Komitmen pimpinan dalam melakukan asistensi perbaikan dokumen SAKIP serta adanya modernisasi sarana prasarana yang menunjang kenyamanan dan kecepatan layanan administrasi.
- **Penghambat:** Penetapan target yang jauh lebih tinggi pada tahun 2025 (Nilai 90) menuntut konsistensi pelayanan yang ekstra, di mana beberapa kendala teknis pada sistem digitalisasi terkadang masih memerlukan waktu pemeliharaan.

Analisis Pencapaian Sasaran Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Angka	80	88,69	110,86
Rata rata Capaian Kinerja				110,86

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang Sangat Memuaskan dengan capaian sebesar 110,86%. Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat mencapai 88,69, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan sekretariat jauh di atas standar yang direncanakan.

- **Faktor Pendorong**

Optimalnya pelayanan internal dan efisiensi birokrasi di lingkungan sekretariat.

Program telah berhasil mencapai target secara maksimal dan memberikan kontribusi besar pada kepuasan pengguna layanan.

Tabel 3.9
Faktor Penghambat dan Pendukung Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	12			Penyelesaian dokumen RKA telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12			Penyelesaian laporan capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4284	3373			pembayaran gaji & tunjangan secara rutin telah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	725	1369			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2			Laporan keuangan akhir tahun SKPD telah terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	24			pembayaran gaji & tunjangan KDH/WKDH secara rutin telah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	11			
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	Pelaksanaan Medical Check Up, menunggu dari permintaan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk fasilitasi Medical Check Up. (Pasif)	-Belum dapat dilaksanakan karena padatnya agenda kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	
					- Masih menunggu Jadwal dri Bupati dan Wakil Bupati	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	16			realisasi operasional kepala daerah & wakil kepala daerah telah terlaksana sesuai dengan permintaan kebutuhan kepala daerah & wakil kepala daerah	

**LKJiP Sekretariat Daerah
Tahun 2025**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
Fasilitasi Kerja sama Daerah	Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	25	27			Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	12	12			Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan sesuai target pada waktu yang telah ditentukan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	45	44			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	37	37			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40	40			Penyelesaian dokumen perencanaan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	850	1040			
	Fasilitasi Bantuan Hukum	3	11			Bahwa kasus Hukum Yang ditangani oleh Bagian Hukum Tahun 2023 ada 4 Kasus dan Sudah ada Putusan dari Pengadilan
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100	100			Realisasi Kinerja Telah Melebihi Target
Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	8	8			Penyusunan rancangan kebijakan sesuai usulan Perangkat Daerah dan diselesaikan tepat waktu
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	9			Penyelesaian dokumen penataan batas daerah, batas antar kecamatan dan rupa-rupa bumi dapat terselesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	3			Penyelesaian dokumen atau laporan telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	2			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	12			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12			Penyelesaian laporan kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24	24			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan

**LKJiP Sekretariat Daerah
Tahun 2025**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	36	36			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	24	24			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12	12			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2300	4262			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan melebihi target yang ditentukan
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	250	260			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan melebihi target yang ditentukan
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	20			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	12			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7	7			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	2	2			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	3			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	12	12			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Ada beberapa pegawai yang mutasi / promosi keluar dari Sekretariat Daerah	Jumlah akan ditinjau Kembali sesuai dengan jumlah pegawai	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	180	Perubahan kebijakan aturan mengenai Bimbingan Teknis	Jumlah orang akan ditinjau kembali sesuai kebutuhan	

**LKJiP Sekretariat Daerah
Tahun 2025**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
				Implementasi Peraturan Perundang-undangan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16	9			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17	24			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25	20	Bersifat pasif dikarenakan menunggu permintaan	Pendataan peralatan rumah tangga yang akan disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30	8			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang di tentukan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9	4	Bersifat pasif dikarenakan menyesuaikan permintaan	Koordinasi pada pengguna Barang Cetak dan penyedia percetakan mengenai kebutuhan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	70			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang di tentukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang di tentukan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	15			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	13			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	13			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	11			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	17	Adanya tambahan pemeliharaan mobil operasional namun pada perubahan tidak mengubah target kinerja	Agar pada saat APBD Perubahan dapat mengingatkan kembali untuk perubahan target kinerja, bukan hanya perubahan anggaran	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	14			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target
Fasilitasi Kerumahtanggaan	Penyediaan Kebutuhan Rumah	12	14			Penyelesaian capaian kinerja telah

*LKJiP Sekretariat Daerah
Tahun 2025*

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		HAMBATAN / MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
Sekretariat Daerah	Tangga Kepala Daerah					terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12	12			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12	6			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	180	91			Penyelesaian capaian kinerja telah terjadwal sehingga dapat menyelesaikan sesuai target yang ditentukan
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100	63			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	15	9			

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 178.586.214.682,40,- (92,40%)** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 193.274.133.768,-** Dengan demikian dapat dikatakan **tahun 2025** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar **Rp. 14.687.919.085,60,-**

Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser TA. 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	TERTIMBANG (%)
BELANJA OPERASI	180.593.250.759,36	166.716.271.839,40	13.876.978.919,96	92,32
BELANJA PEGAWAI	43.988.647.430,00	40.024.864.804,00	3.963.782.626,00	90,99
BELANJA BARANG DAN JASA	115.216.453.329,36	106.242.836.602,40	8.973.616.726,96	92,21
BELANJA HIBAH	21.388.150.000,00	20.448.570.433,00	939.579.567,00	95,61
BELANJA MODAL	12.680.883.008,64	11.868.946.743,00	811.936.265,64	93,60
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	11.770.000.599	10.978.014.943	791.985.655,64	93,27
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	819.862.410	800.799.800	19.062.610,00	97,67
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
BELANJA MODAL ASET LAINNYA	91.020.000	90.132.000	888.000,00	99,02
JUMLAH	193.274.133.768,00	178.585.218.582,40	14.688.915.185,60	92,40

Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada table halaman berikutnya.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TATA PEMERINTAHAN						
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.993.939.180,00	1.990.296.984,00	3.642.196	99,82	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	591.303.175,00	586.314.194,00	4.988.981	99,16	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.502.306.741,00	1.444.144.028,00	58.162.713	96,13	
	JUMLAH			4.087.549.096	4.020.755.206	66.793.890	98,37
	HUKUM						
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	583.166.634,00	569.294.292,00	13.872.342	97,62	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.431.135.984,00	2.325.751.656,00	105.384.328	95,67	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	257.069.972,00	256.212.585,00	857.387	99,67	
	JUMLAH			3.271.372.590	3.151.258.533	120.114.057	96,33
	KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.766.531.597,00	30.369.766.250,00	2.396.765.347	92,69	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7.195.484.105,00	7.110.874.344,00	84.609.761	98,82	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	254.111.621,00	195.002.000,00	59.109.621	76,74	

LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH		40.216.127.323	37.675.642.594	2.540.484.729	93,68
	KERJA SAMA					
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	419.265.000,00	413.419.000,00	5.846.000	98,61
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	341.303.235,00	340.644.174,40	659.061	99,81
	JUMLAH		760.568.235	754.063.174,40	6.505.061	99,14
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			48.335.617.244	45.601.719.507	2.733.897.737	94,34
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PENGADAAN BARANG DAN JASA					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	888.432.648	859.223.057	29.209.591	96,71
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.225.578.397	1.089.932.707	135.645.690	88,93
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	916.964.515	837.753.537	79.210.978	91,36
	JUMLAH		3.030.975.560	2.786.909.301	244.066.259	91,95
	PEREKONOMIAN					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	304.872.708	304.662.000	210.708	99,93
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	363.066.000	359.152.890	3.913.110	98,92
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	302.171.031	302.038.740	132.291	99,96
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	31.947.952	31.947.952	0	100,00
	JUMLAH		1.002.057.691	997.801.582	4.256.109	99,58
	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					

LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	311.438.830	286.923.100	24.515.730	92,13	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	340.666.592	280.171.406	60.495.186	82,24	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	341.356.222	287.772.940	53.583.282	84,30	
		JUMLAH	993.461.644	854.867.446	138.594.198	86,05	
	SUMBER DAYA ALAM						
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	722.793.790	595.374.694	127.419.096	82,37	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	275.262.000	274.481.869	780.131	99,72	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	393.691.937	385.481.126	8.210.811	97,91	
	JUMLAH	1.391.747.727	1.255.337.689	136.410.038	90,20		
	JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			6.418.242.622	5.894.916.018	523.326.604	91,85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ORGANISASI						
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	696.111.541	675.114.490	20.997.051	96,98	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	319.797.000	261.367.768	58.429.232	81,73	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	378.741.699	352.121.479	26.620.220	92,97	
		Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	48.712.000	43.207.600	5.504.400	88,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	112.599.000	106.158.990	6.440.010	94,28	

LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH	1.555.961.240	1.437.970.327	117.990.913	92,42
		UMUM				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	584.240.000	559.710.095	24.529.905	95,80
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	411.000.000	350.579.417	60.420.583	85,30
		JUMLAH	995.240.000	910.289.512	84.950.488	91,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177.285.542	162.377.800	14.907.742	91,59
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.306.279.028	9.376.324.670	929.954.358	90,98
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.100.000.000	976.088.089	123.911.911	88,74
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	582.027.552	517.496.850	64.530.702	88,91
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.094.930	84.855.000	239.930	99,72
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.802.218.465	11.772.097.917	1.030.120.548	91,95
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.560.210.997	5.180.279.907	379.931.090	93,17
		JUMLAH	30.613.116.514	28.069.520.233	2.543.596.281	91,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.723.157.699	3.470.797.098	2.252.360.601	60,64
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.654.416.940	15.271.906.751	382.510.189	97,56
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.688.893.756	9.679.910.000	8.983.756	99,91
		JUMLAH	31.066.468.395	28.422.613.849	2.643.854.546	91,49

LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	948.735.600	755.691.450	193.044.150	79,65	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.258.128.950	1.082.734.420	175.394.530	86,06	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.492.286.050	13.161.599.811	330.686.239	97,55	
	JUMLAH		15.699.150.600	15.000.025.681	699.124.919	95,55	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.654.410.650	2.183.555.243	470.855.407	82,26	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.491.267.310	2.374.667.142	116.600.168	95,32	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	600.000.000	506.916.620	93.083.380	84,49	
	JUMLAH		5.745.677.960	5.065.139.005	680.538.955	88,16	
	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	2.743.837.783	2.743.089.300	748.483	99,97	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.451.194.013	1.449.001.500	2.192.513	99,85	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.288.980.099	1.281.861.838	7.118.261	99,45	
	JUMLAH		5.484.011.895	5.473.952.638	10.059.257	99,82	
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	630.532.601	625.022.359	5.510.242	99,13	

LKJIP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
	Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	92.843.692	90.206.900	2.636.792	97,16	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.889.529	83.906.300	1.983.229	97,69	
	JUMLAH		809.265.822	799.135.559	10.130.263	98,75	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.949.301.742	39.176.382.633	3.772.919.109	91,22	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	865.746.806	753.201.668	112.545.138	87,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.038.051	22.742.835	295.216	98,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	174.153.189	172.915.914	1.237.275	99,29	
	JUMLAH		44.012.239.788	40.125.243.050	3.886.996.738	91,17	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	407.465.688	224.152.171	183.313.517	55,01	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.231.676.000	933.104.800	298.571.200	75,76	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	27.436.232	272.563.768	9,15	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0	100,00	
	JUMLAH		2.539.141.688	1.784.693.203	754.448.485	70,29	
	JUMLAH REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			138.520.273.902	127.088.583.057	11.431.690.845	91,75

LKJiP Sekretariat Daerah
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL KESELURUHAN			193.274.133.768	178.585.218.582	14.688.915.185,60	92,40

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya tidak **mencapai dari 100%**. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 (tiga) sasaran, , sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

1. **Sasaran: Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra**
 - **Tingkat Efisiensi: 4,73%**
 - **Analisa:** Sasaran ini memiliki tingkat efisiensi **tertinggi** dibandingkan sasaran lainnya. Dengan capaian kinerja yang sangat optimal sebesar **99,07%**, anggaran yang digunakan hanya sebesar **94,34%**. Hal ini membuktikan bahwa proses koordinasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra telah dilakukan secara sangat efisien, di mana efektivitas kerja tetap terjaga tinggi meskipun terdapat penghematan anggaran sebesar 4,73%.
2. **Sasaran: Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan**
 - **Tingkat Efisiensi: 4,06%**
 - **Analisa:** Sasaran ini menunjukkan efisiensi sebesar **4,06%**. Capaian kinerja sebesar **95,91%** berhasil diraih dengan penyerapan anggaran sebesar **91,85%**. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program di bidang perekonomian dan pembangunan dilakukan secara ekonomis tanpa mengurangi kualitas hasil koordinasi kebijakan yang ditargetkan.
3. **Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**
 - **Tingkat Efisiensi: 1,96%** (Dihitung dari selisih Capaian 93,88% - Penyerapan 91,92%)
 - **Analisa:** Sasaran ini mencatatkan efisiensi sebesar **1,96%**. Peningkatan kualitas layanan yang diukur melalui Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Layanan mencapai angka **93,88%** dengan penggunaan anggaran **91,92%**. Meskipun angka efisiensinya paling kecil dibanding sasaran lain, hasil ini tetap dikategorikan efisien karena organisasi mampu meningkatkan standar akuntabilitas (AKIP) dan kepuasan publik dengan anggaran yang tetap terkendali.

Secara kolektif, seluruh sasaran strategis pada tahun 2025 telah memenuhi prinsip "**Value for Money**". Rata-rata capaian kinerja berada di atas 90% sedangkan penyerapan anggaran berada di kisaran 91%-94%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen organisasi telah berhasil melakukan **optimalisasi sumber daya** dengan mencegah pemborosan anggaran tanpa menurunkan kualitas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3.12
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(≥ 100 %)		
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	99,07	94,34	4,73
	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan			
2	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	95,91	91,85	4,06
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	93,88	91,92	4,06
		Indeks kepuasan layanan administrasi umum			

E. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

E.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2024

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Paser terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memperoleh nilai **71,37** dengan interpretasi predikat (**BB**), maka pada tahun 2024 direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paser hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen rencana aksi dengan realisasi berupa informasi kinerja outcome ;
2. Memasukan perbandingan capaian kinerja tahun evaluasi dengan capaian Renstra di Bab III LKjIP.
3. Memasukan Tindak Lanjut evaluasi LKjIP Tahun sebelumnya di Bab III.

E.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- 1 Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja (Renja Tahun 2024) di website resmi OPD tepat waktu
- 2 Melaksanakan dan mendokumentasikan rapat perencanaan kinerja pada level bidang dan sekretariat
- 3 Melengkapi Rencana Aksi dengan mencantumkan anggaran sesuai PK dan penanggungjawab masing-masing kegiatan/sub kegiatan
- 4 Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sumber data yang sesuai dengan penjelasan definisi operasional dan melibatkan penanggungjawab bagian Tata Pemerintahan
- 5 Membuat data kinerja yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Bagian yang merupakan hasil pengukuran dan pemantauan unit di bawahnya secara berjenjang, sesuai dengan definisi operasional pada Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja masing-masing Kepala Bagian yang ditandatangani oleh setiap Kepala Bagian serta diketahui Asisten

- 6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada level bidang dan sekretariat secara berkala setiap triwulan, menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang disertai evidence/bukti dukung terhadap hasil kinerja, serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)
- 7 Menyusun LKjIP Tahun 2025 dengan melengkapi informasi :
 - a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun pelaporan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya (2024, 2023 dan 2022) serta analisis perbandingannya
 - b. Analisis realisasi capaian kinerja secara kumulatif hingga tahun dilakukan evaluasi dengan target akhir/total Renstra
 - c. Penyebab keberhasilan/kegagalan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - d. Upaya-upaya dalam efisiensi anggaran, analisis efektivitas atas penggunaan sumber daya non keuangan dan upaya untuk melakukan efisiensi atas penggunaan sumber daya non keuangan
- 8 Mengimplementasikan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TLHE) serta melakukan inovasi, pemanfaatannya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2022 – 2026.

Dari hasil analisis capaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2024 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis berada pada kategori **Berhasil dengan** nilai rata – rata **96,36%**.
2. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra** pada tahun 2025 sebesar **99,07%** dikategorikan **Berhasil**, hal ini disebabkan karena pada 4 Bagian yang mengampu indikator sasaran tersebut ada beberapa yang dapat melebihi target, dalam penilaian LPPD Kabupaten Paser tahun 2023 memperoleh nilai 2,78 sedangkan tahun 2024 Nilai LLPD Belum Keluar dari Mendagri.
3. "Capaian kinerja sasaran Meningkatkan koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan pada tahun 2025 sebesar 95,91% dikategorikan **Berhasil**, hal ini disebabkan **adanya perubahan regulasi atau kebijakan teknis dari pemerintah pusat yang memerlukan waktu penyesuaian dalam implementasinya di daerah**, sehingga realisasi sebesar 86,32% belum mencapai target optimal yang ditetapkan yaitu 90%."
4. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum** pada tahun 2025 sebesar **93,88 %** dikategorikan **Berhasil**. Capaian ini disebabkan karena dalam pengukuran kinerja Tahun 2025 telah menyelesaikan Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Indeks kepuasan layanan administrasi umum.
5. Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 178.585.218.582,40,- (92,40)** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 193.274.133.768,-** Dengan demikian dapat dikatakan **tahun 2025** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar **Rp.14.688.915.185,-**. Adanya Silpa ini disebabkan karena

penambahan alokasi anggaran untuk beberapa Sub Kegiatan dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian realisasi Program dan Kegiatan, namun demikian secara umum Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mengacu pada hasil pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka disampaikan beberapa saran dan langkah sebagai berikut:

1. **Percepatan Sinkronisasi Regulasi** Mengingat adanya hambatan pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan akibat perubahan kebijakan pusat, disarankan agar Sekretariat Daerah memperkuat fungsi *early warning* terhadap perubahan regulasi melalui koordinasi intensif dengan Kementerian terkait. Hal ini penting agar penyesuaian di tingkat daerah dapat dilakukan lebih cepat tanpa menghambat realisasi fisik.
2. **Penguatan Pengawasan Nilai LPPD** Terkait keterlambatan rilis nilai LPPD dari Kementerian Dalam Negeri, disarankan kepada bagian terkait untuk tetap melakukan *self-assessment* (penilaian mandiri) secara berkala. Hal ini dilakukan agar dokumen pendukung tetap tersedia lengkap dan valid, sehingga ketika masa penilaian pusat tiba, nilai yang diperoleh dapat maksimal melampaui capaian tahun 2022.
3. **Optimalisasi Perencanaan pada APBD Perubahan** Sehubungan dengan adanya Silpa yang cukup signifikan akibat penambahan alokasi pada APBD Perubahan, disarankan agar ke depannya perencanaan anggaran pada perubahan APBD tetap mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan (aspek kronologis). Perlu dilakukan identifikasi kegiatan yang bersifat *fast-track* (cepat dilaksanakan) agar penyerapan anggaran tetap selaras dengan capaian fisik.
4. **Peningkatan Kualitas SAKIP Secara Berkelanjutan** Meskipun nilai AKIP sudah mencapai kategori **BB**, disarankan agar dilakukan pembinaan dan asistensi yang lebih mendalam kepada perangkat daerah yang masih memiliki nilai di bawah rata-rata. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja menuju predikat **A** di tahun mendatang.
5. **Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi** Untuk meminimalisir kendala administratif, disarankan pengembangan sistem monitoring kinerja berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini akan mempermudah pimpinan dalam memantau progres *real-time* dari 4 Bagian pengampu sasaran, sehingga potensi kendala di lapangan dapat dideteksi dan dicarikan solusi lebih awal.
6. **Penguatan Indeks Kepuasan Layanan** Mempertahankan nilai kepuasan

layanan yang sudah baik memerlukan inovasi. Disarankan untuk rutin melakukan survei kepuasan internal secara berkala (triwulanan) guna mendapatkan masukan langsung dari unit kerja terkait, sebagai dasar perbaikan layanan administrasi umum secara kontinyu.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

NO	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi Per Triwulan TA.2025				Realisasi Pagu TA. 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			SISA ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	K	RP	K	Fisik	RP	
			RP	RP	RP	RP						
	Sekretariat Daerah	193.274.133.768	17.051.901.321	42.244.611.662	40.379.910.697	78.908.794.904	118,49%	178.585.218.584	118,49%	118,49%	92,40%	14.688.915.184
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.418.242.622	820.698.195	554.988.073	715.848.378	3.803.381.372	100,83%	5.894.916.018	100,83%	100,83%	91,85%	523.326.604
1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3.030.975.560	333.752.306	209.689.010	459.351.050	1.784.116.935	129,77%	2.786.909.301	129,77%	129,77%	91,95%	244.066.259
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.030.975.560	333.752.306	209.689.010	459.351.050	1.784.116.935	129,77%	2.786.909.301	129,77%	129,77%	91,95%	244.066.259
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	888.432.648	38.140.000	74.460.460	212.590.450	534.032.147	4262	859.223.057	185,30%	185,30%	96,71%	29.209.591
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.225.578.397	218.561.805	93.391.550	98.546.600	679.432.752	260	1.089.932.707	104,00%	104,00%	88,93%	135.645.690
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	916.964.515	77.050.501	41.837.000	148.214.000	570.652.036	20	837.753.537	100,00%	100,00%	91,36%	79.210.978
2	Bagian Perekonomian	1.002.057.691	206.756.087	148.062.761	24.202.000	618.780.734	93,75%	997.801.582	93,75%	93,75%	99,58%	4.256.109
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.002.057.691	206.756.087	148.062.761	24.202.000	618.780.734	93,75%	997.801.582	93,75%	93,75%	99,58%	4.256.109
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	304.872.708	94.079.466	29.202.700	8.000.000	173.379.834	18	304.662.000	75,00%	75,00%	99,93%	210.708
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	363.066.000	57.842.869	62.703.351	-	238.606.670	36	359.152.890	100,00%	100,00%	98,92%	3.913.110
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	302.171.031	36.033.800	56.156.710	4.094.000	205.754.230	24	302.038.740	100,00%	100,00%	99,98%	132.291
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	31.947.952	18.799.952	-	12.108.000	1.040.000	12	31.947.952	100,00%	100,00%	100,00%	-
3	Bagian Administrasi Pembangunan	993.461.644	53.147.916	73.342.406	123.983.733	604.393.391	80,56%	854.867.446	80,56%	80,56%	86,05%	138.594.198
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	993.461.644	53.147.916	73.342.406	123.983.733	604.393.391	80,56%	854.867.446	80,56%	80,56%	86,05%	138.594.198
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	311.438.830	31.494.415	36.070.622	38.356.700	181.001.363	2	286.923.100	100,00%	100,00%	92,13%	24.515.730
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	340.666.592	10.037.821	16.375.442	76.177.033	177.581.110	10	280.171.406	83,33%	83,33%	82,24%	60.495.186
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	341.356.222	11.615.680	20.896.342	9.450.000	245.810.918	7	287.772.940	58,33%	58,33%	84,30%	53.583.282
4	Bagian Sumber Daya Alam	1.391.747.727	227.041.886	123.893.896	108.311.595	796.090.312	99,26%	1.255.337.689	99,26%	99,26%	90,20%	136.410.038
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.391.747.727	227.041.886	123.893.896	108.311.595	796.090.312	99,26%	1.255.337.689	99,26%	99,26%	90,20%	136.410.038
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	722.793.790	63.081.500	57.803.294	72.761.435	401.728.465	44	595.374.694	97,78%	97,78%	82,37%	127.419.096
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	275.262.000	68.422.571	42.198.402	17.820.560	146.040.336	37	274.481.869	100,00%	100,00%	99,72%	780.131
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	393.691.937	95.537.815	23.892.200	17.729.600	248.321.511	40	385.481.126	100,00%	100,00%	97,91%	8.210.811
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	48.335.617.244	1.330.454.736	11.299.194.130	14.870.633.060	18.101.437.581	136,77%	45.601.719.507	136,77%	136,77%	94,34%	2.733.897.737
5	Bagian Tata Pemerintahan	4.087.549.096	272.790.204	391.281.341	771.717.555	2.584.966.106	100,00%	4.020.755.206	100,00%	100,00%	98,37%	66.793.890
	Administrasi Tata Pemerintahan	4.087.549.096	272.790.204	391.281.341	771.717.555	2.584.966.106	100,00%	4.020.755.206	100,00%	100,00%	98,37%	66.793.890
	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.993.939.180	84.733.138	95.753.800	612.224.800	1.197.585.246	8	1.990.296.984	100,00%	100,00%	99,82%	3.642.196
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	591.303.175	65.273.276	104.995.458	86.341.800	329.703.660	9	586.314.194	100,00%	100,00%	99,16%	4.988.981
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.502.306.741	122.783.790	190.532.083	73.150.955	1.057.677.200	3	1.444.144.028	100,00%	100,00%	96,13%	58.162.713
6	Bagian Hukum	3.271.372.590	67.833.280	180.022.586	368.014.268	2.535.388.399	285,23%	3.151.258.533	285,23%	285,23%	96,33%	120.114.057
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.271.372.590	67.833.280	180.022.586	368.014.268	2.535.388.399	285,23%	3.151.258.533	285,23%	285,23%	96,33%	120.114.057
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	583.166.634	31.782.580	88.294.172	232.958.040	216.259.500	1040	569.294.292	122,35%	122,35%	97,62%	13.872.342
	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.431.135.984	16.199.900	28.108.780	91.973.500	2.189.469.476	19	2.325.751.656	633,33%	633,33%	95,67%	105.384.328
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	257.069.972	19.850.800	63.619.634	43.082.728	129.659.423	100	256.212.585	100,00%	100,00%	99,67%	857.387
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	40.216.127.323	935.386.956	10.641.483.103	13.557.935.128	12.540.837.407	57,85%	37.675.642.594	57,85%	57,85%	93,68%	2.540.484.729
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.216.127.323	935.386.956	10.641.483.103	13.557.935.128	12.540.837.407	57,85%	37.675.642.594	57,85%	57,85%	93,68%	2.540.484.729
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.766.531.597	833.122.156	10.476.832.780	10.349.178.890	6.710.632.424	91	30.369.766.250	50,56%	50,56%	92,68%	2.396.765.347
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7.195.484.105	26.304.800	131.500.323	3.173.888.238	3.779.180.983	63	7.110.874.344	63,00%	63,00%	98,82%	84.609.761
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	254.111.621	75.960.000	33.150.000	34.868.000	51.024.000	9	195.002.000	60,00%	60,00%	76,74%	59.109.621
8	Bagian Kerjasama	760.568.235	54.444.296	86.407.100	172.966.109	440.245.669	104,00%	754.063.174	104,00%	104,00%	99,14%	6.505.061
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	760.568.235	54.444.296	86.407.100	172.966.109	440.245.669	104,00%	754.063.174	104,00%	104,00%	99,14%	6.505.061

NO	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi Per Triwulan TA.2025				Realisasi Pagu TA. 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			SISA ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	K	RP	K	Fisik	RP	
			RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	419.265.000	20.750.900	39.475.300	92.100.554	261.092.246	27	413.419.000	108,00%	108,00%	98,61%	5.846.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	341.303.235	33.693.396	46.931.800	80.865.555	179.153.423	12	340.644.174	100,00%	100,00%	99,81%	659.061
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.520.273.902	14.900.748.390	30.390.429.459	24.793.429.259	57.003.975.951	118,27%	Rp127.088.583.059	159,83%	160%	91,75%	Rp 11.431.690.843
9	Bagian Organisasi	1.555.961.240	198.105.899	110.525.635	135.107.319	994.231.474	100,00%	1.437.970.327	100,00%	100,00%	92,42%	117.990.913
	Penataan Organisasi	1.555.961.240	198.105.899	110.525.635	135.107.319	994.231.474	100,00%	1.437.970.327	100,00%	100,00%	92,42%	117.990.913
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	696.111.541	71.156.104	29.533.200	37.805.400	536.619.786	12	675.114.490	100,00%	100,00%	96,98%	20.997.051
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	319.797.000	49.730.545	41.106.355	38.455.100	132.075.768	7	261.367.768	100,00%	100,00%	81,73%	58.429.232
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	378.741.699	52.596.632	7.725.880	18.789.340	273.009.627	2	352.121.479	100,00%	100,00%	92,97%	26.620.220
	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	48.712.000	-	2.560.000	12.546.000	28.111.600	2	43.207.600	100,00%	100,00%	88,70%	5.504.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	112.599.000	24.622.618	29.610.200	27.511.479	24.414.693	3	106.158.990	100,00%	100,00%	94,28%	6.440.010
10	Bagian Umum	85.651.329.469	5.672.846.480	13.667.635.787	14.726.391.240	44.361.255.807	130,26%	78.428.129.314	142,82%	142,82%	91,57%	7.223.200.155
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	995.240.000	35.915.809	65.384.000	184.651.800	624.337.903	83,89%	910.289.512	83,89%	83,89%	91,46%	84.950.488
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	584.240.000	35.915.809	65.384.000	184.651.800	273.758.486	12	559.710.095	100,00%	100,00%	95,80%	24.529.905
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	411.000.000	-	-	-	350.579.417	122	350.579.417	67,78%	67,78%	85,30%	60.420.583
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.613.116.514	2.117.465.378	5.090.087.979	5.310.333.267	15.551.633.611	70,74%	28.069.520.235	70,74%	70,74%	91,69%	2.543.596.279
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177.285.542	14.907.300	39.058.700	29.015.700	79.396.100	9	162.377.800	56,25%	56,25%	91,59%	14.907.742
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.306.279.028	167.727.038	2.120.661.709	1.283.991.500	5.803.944.425	24	376.324.672	141,18%	141,18%	90,98%	929.954.356
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.100.000.000	56.000.700	108.293.381	114.622.800	697.171.208	20	976.088.089	80,00%	80,00%	88,74%	123.911.911
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	582.027.552	-	57.559.500	42.624.300	417.313.050	8	517.496.850	26,67%	26,67%	88,91%	64.530.702
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.094.930	-	-	21.875.000	62.980.000	4	84.855.000	44,44%	44,44%	99,72%	239.930
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.802.218.465	1.235.530.772	1.996.192.143	2.696.345.701	5.844.029.301	70	11.772.097.917	46,67%	46,67%	91,95%	1.030.120.548
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.560.210.997	643.299.568	768.322.546	1.121.858.266	2.646.799.527	12	5.180.279.907	100,00%	100,00%	93,17%	379.931.090
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.066.468.395	2.224.531.313	5.401.730.083	6.542.104.029	14.254.248.424	164,44%	28.422.613.849	164,44%	164,44%	91,49%	2.643.954.546
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.723.157.699	780.107.939	806.737.393	876.730.152	1.007.221.614	15	3.470.797.098	125,00%	125,00%	60,64%	2.252.360.601
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.654.416.940	113.146.800	2.175.346.800	3.245.727.987	9.737.685.164	13	15.271.906.751	260,00%	260,00%	97,56%	382.510.189
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.688.893.756	1.331.276.574	2.419.645.890	2.419.645.890	3.509.341.646	13	9.679.910.000	108,33%	108,33%	99,91%	8.983.756
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.699.150.600	801.442.600	1.544.864.288	1.534.127.200	11.119.591.593	306,11%	15.000.025.681	306,11%	306,11%	95,55%	699.124.919
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	948.735.600	96.603.600	87.342.400	228.552.500	343.192.950	11	755.691.450	366,67%	366,67%	79,65%	193.044.150
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.258.128.950	176.404.600	198.143.908	276.950.600	431.235.312	17	1.082.734.420	85,00%	85,00%	86,06%	175.394.530
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.492.286.050	528.434.400	1.259.377.980	1.028.624.100	10.345.163.331	14	13.161.599.811	466,67%	466,67%	97,55%	330.686.239
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	5.745.677.960	375.776.380	1.496.560.035	1.035.342.444	2.157.460.146	88,89%	5.065.139.005	88,89%	88,89%	88,16%	680.538.955
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.654.410.650	342.766.800	664.518.695	475.505.775	700.763.973	14	2.183.555.243	116,67%	116,67%	82,28%	470.855.407
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.491.267.310	10.389.100	711.220.860	472.029.149	1.181.028.033	12	2.374.667.142	100,00%	100,00%	95,32%	116.800.168
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	600.000.000	22.620.480	120.820.480	87.807.520	275.668.140	6	506.916.620	50,00%	50,00%	84,49%	93.083.380
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.531.676.000	117.715.000	69.009.402	119.832.500	653.984.130	67,50%	960.541.032	67,50%	67,50%	62,71%	571.134.968
	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.231.676.000	117.715.000	69.009.402	98.383.500	647.996.898	11	933.104.800	110,00%	110,00%	75,76%	298.571.200
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	-	-	21.449.000	5.987.232	2	27.436.232	25,00%	25,00%	9,15%	272.563.768
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.484.011.895	1.102.507.150	811.984.438	388.822.900	3.170.638.150	100,00%	5.473.952.638	100,00%	100,00%	99,82%	10.059.257
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.484.011.895	1.102.507.150	811.984.438	388.822.900	3.170.638.150	100,00%	5.473.952.638	100,00%	100,00%	99,82%	10.059.257
	Fasilitasi Keprotokolan	2.743.837.783	485.862.000	398.381.800	219.858.400	1.638.987.100	12	2.743.089.300	100,00%	100,00%	99,97%	748.483
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.451.194.013	267.953.400	158.207.600	77.388.000	945.452.500	12	1.449.001.500	100,00%	100,00%	99,85%	2.192.513
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.288.980.099	348.691.750	255.395.038	91.576.500	586.198.550	12	1.281.861.838	100,00%	100,00%	99,45%	7.118.261
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan	45.828.971.298	7.927.288.861	15.800.283.599	9.543.107.800	8.477.850.520	106,47%	41.748.530.780	106,47%	106,47%	91,10%	4.080.440.518
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	809.265.822	106.279.390	123.228.200	160.970.400	408.657.569	100,00%	799.135.559	100,00%	100,00%	98,75%	10.130.263
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	630.532.601	97.779.390	68.397.400	143.103.200	315.742.369	9	625.022.359	100,00%	100,00%	99,13%	5.510.242
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	92.843.692	-	48.162.300	-	42.044.600	12	90.206.900	100,00%	100,00%	97,16%	2.636.792
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.889.529	8.500.000	6.668.500	17.867.200	50.870.600	12	83.906.300	100,00%	100,00%	97,69%	1.983.229
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.012.239.788	7.714.863.735	15.321.625.400	9.127.705.137	7.961.048.778	105,71%	40.125.243.050	105,71%	105,71%	91,17%	3.886.996.738
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.949.301.742	7.372.485.175	15.112.004.311	8.972.954.849	7.718.938.298	3373	39.176.382.633	78,73%	78,73%	91,22%	3.772.919.109

NO	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi Per Triwulan TA.2025	Realisasi Per Triwulan TA.2025	Realisasi Per Triwulan TA.2025	Realisasi Per Triwulan TA.2025	Realisasi Pagu TA. 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			SISA ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	K	RP	K	Fisik	RP	
		RP	RP	RP	RP	RP						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	174.153.189	26.097.900	64.375.521	69.222.493	13.220.000	12	172.915.914	100,00%	100,00%	99,29%	1.237.275
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	865.746.806	316.280.660	145.245.568	84.986.160	206.689.280	1369	753.201.668	144,11%	144,11%	87,00%	112.545.138
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.038.051	-	-	541.635	22.201.200	2	22.742.835	100,00%	100,00%	98,72%	295.216
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.007.465.688	106.145.736	355.429.999	254.432.263	108.144.173	113,69%	824.152.171	113,69%	113,69%	81,80%	183.313.517
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	407.465.688	49.645.736	101.553.645	36.440.797	36.511.993	24	224.152.171	85,71%	85,71%	55,01%	183.313.517
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	56.500.000	253.876.354	217.991.466	71.632.180	17	600.000.000	141,67%	141,67%	100,00%	-